****

Artikel masuk:

.....

Artikel diperbaiki:

....

Artikel diterima:

.....

ANALISIS KESESUAIAN PELAPORAN KEUANGAN PERCETAKAN PP BERDASARKAN SAK EMKM

Isna Dwiyanti1,

Ika Wulandari2

1Percetakan PP

2Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana Yogyakarta

E-mail Korespondensi: ikawulandari@mercubuana-yogya.ac.id

#

# *Abstract*

 *The proper application of SAK EMKM in preparing financial reports helps MSME players to make financial reports that meet standards, as well as obtain the necessary financial information thereby reducing the risk of delays and errors in making decisions in their business. Research using descriptive comparative method was carried out by comparing the financial reports of PP printing with SAK EMKM. Financial reporting on PP printing is not in accordance with SAK EMKM with a percentage of 46.2%. Some of the items contained in SAK EMKM are not found in the preparation of PP Printing financial statements.*

*Keywords: MSME, Financial Statements, SAK EMKM.*

# Abstrak

 Penerapan SAK EMKM yang tepat dalam pembuatan laporan keuangan membantu pelaku UMKM untuk membuat laporan keuangan yang memenuhi standar, serta mendapatkan informasi keuangan yang diperlukan sehingga mengurangi resiko keterlambatan dan kesalahan dalam pengambilan keputusan pada usahanya. Penelitian menggunakan metode deskriptif komparatif dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan Percetakan PP dengan SAK EMKM. Pelaporan keuangan pada Percetakan PP belum sesuai dengan SAK EMKM dengan hasil persentase kriteria sebesar 46,2%. Beberapa pos yang terdapat pada SAK EMKM tidak terdapat pada penyusunan laporan keuangan Percetakan PP.

Kata kunci: UMKM, Laporan Keuangan, SAK EMKM

# LATAR BELAKANG

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang disingkat menjadi UMKM memiliki peranan penting dalam pertumbuhan perekonomian. Hadirnya UMKM membawa dampak positif peningkatan kesejahteraan masyarakat di negara Indonesia yang merupakan negara yang padat penduduknya. UMKM menjadi salah satu penggerak roda perekonomian masyarakat yang mendorong pertumbuhan perekonomian negara. Berdasarkan data dari Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) tahun 2021, UMKM berkontribusi sebesar 61,07 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Adapun UMKM menyerap tenaga kerja sebesar 96,92 persen, sedangkan Usaha Besar (UB) hanya 3,08 persen. (Wibowo, 2022)

Dari data tersebut membuktikan bahwa dengan adanya UMKM mendorong terciptanya lapangan pekerjaan yang dapat menyerap banyak tenaga kerja. Dengan demikian memberikan efek positif untuk mengurangi jumlah pengangguran yang merupakan salah satu permasalahan di Indonesia.

UMKM memerlukan dukungan dari semua pihak untuk terus maju dan berkembang demi terciptanya kehidupan perekonomian yang baik untuk negara. Dalam usaha pencapaian tujuan tersebut dibutuhkan perubahan dan perkembangan yang lebih baik, salah satunya pada penyusunan laporan keuangan yang dilakukan UMKM.

Hal tersebut penting dilakukan karena UMKM memiliki hambatan sama halnya seperti sektor bisnis yang lainnya. Salah satu hambatan yang sering ditemukan pada UMKM yaitu keterbatasan informasi keuangan usaha yang terdapat pada laporan keuangan. Keterbatasan informasi tersebut menyebabkan tertundanya pengambilan keputusan selanjutnya yang akan diterapkan pelaku UMKM pada usahanya. Bahkan karena keterbatasan informasi tersebut dapat terjadi kesalahan pengambilan keputusan oleh pelaku UMKM yang dapat menyebabkan kerugian.

Informasi akuntansi terkait keuangan usaha yang terdapat pada laporan keuangan mempunyai salah satu peran penting dalam mencapai tujuan pelaku UMKM. Disamping itu laporan keuangan yang memenuhi standar dapat membantu pemilik UMKM untuk menarik dan meyakinkan para penyedia modal untuk berinvestasi pada usaha tersebut. Adanya laporan keuangan yang memenuhi standar mempermudah pemilik UMKM untuk mendapatkan tambahan modal dari kredit usaha rakyat yang disediakan lembaga keuangan.

Akan tetapi masih banyak pelaku UMKM yang belum melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan usahanya dengan baik. Karena sebagian pelaku UMKM masih menganggap bahwa pelaporan keuangan tidak terlalu penting.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada tahun 2016 telah menyusun dan mengesahkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) sebagai perwujudan dukungan untuk UMKM dalam rangka memenuhi kebutuhan pelaporan keuangannya. SAK EMKM per 1 Januari 2018 efektif diterapkan sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan UMKM.

SAK EMKM merupakan standar akuntansi keuangan yang dibuat lebih sederhana dari SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik). SAK EMKM mengatur transaksi yang umum dilakukan pelaku UMKM. Dasar pengukurannya murni menggunakan biaya historis, sehingga EMKM cukup mencatat asset dan liabilitas sebesar biaya perolehannya. (IAI:2016)

Dengan adanya SAK EMKM diharapkan para pelaku UMKM dapat menerapkan SAK EMKM tersebut serta membuat laporan keuangan yang memenuhi standar.

Penerapan SAK EMKM yang tepat dalam pembuatan laporan keuangan dapat membantu pelaku UMKM untuk mendapatkan informasi keuangan yang diperlukan sehingga mengurangi resiko keterlambatan dan kesalahan dalam pengambilan keputusan untuk usahanya. Laporan keuangan yang memenuhi standar memberikan informasi keuangan perusahaan termasuk posisi keuangan, kinerja keuangan maupun kas yang dimiliki usaha tersebut. Setelah dibentuk dan disahkan SAK EMKM oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI), selanjutnya bagaimana para pelaku UMKM menerapkan SAK EMKM pada laporan keuangannya.

Dalam penelitian Tasum (2020) menunjukan hasil penelitian bahwasanya pencatatan dan penyusunan laporan keuangan masih sangat sederhana dan sesuai kebutuhan dan pemahaman pemilik. Belum menerapkan SAK EMKM karena masih belum memahami tentang SAK EMKM dan keterbatasan waktu serta sumber daya manusianya.

Dalam penelitian Wardani (2021) hasil dari penelitian yang di lakukannya pelaku UMKM melakukan pencatatan dari nota transaksi perharinya kemudian dicatat kedalam buku catatan pemilik usaha, akan tetapi masih belum sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah sehingga pencatatan tersebut hanya sebatas pencatatan pengeluaran dan pendapatan saja.

Dalam penelitian Shinduprinata (2022) penelitian yang sudah dilakukan menunjukan hasilpada UMKM *Glass Of Dimension* telah mengaplikasikan perhitungan saldo pada akun-akun di pos asset sesuai dengan SAK EMKM, namun belum menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM.

*.*

# METODE PENELITIAN

Merupakan penelitian deskriptif komparatif. Menurut Sugiyono (2017) dalam Wardani (2021) Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan suatu peristiwa, dengan cara melakukan pengamatan yang bersifat ilmiah dan bersikap cermat agar pihak lain dapat dengan mudah mendapat gambaran mengenai objek yang diteliti dalam bentuk kata-kata dan bahasa.

Menurut Sugiyono (2012) dalam Loviannauli dan Saptono (2021) Penelitian komparatif merupakan penelitian yang membandingkan keberadaan satu variable atau lebih pada dua atau sampel yang berbeda, atau pada waktu yang berbeda.

Dalam penelitian ini akan dilakukan perbandingan antara laporan keuangan Percetakan PP dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). Hasil perbandingan tersebut akan dijelaskan dan diuraikan secara deskriptif.

# HASIL PENELITIAN

**Tabel 1. Hasil Analisis Kesesuaian Pelaporan Keuangan Percetakan PP Berdasarkan SAK EMKM**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Jenis Laporan Keuangan** | **Keterangan** |
| **YA** | **TIDAK** |
| 1 | Laporan posisi keuangan | 4 | 3 |
| 2 | Laporan laba rugi | 2 | 1 |
| 3 | Catatan atas laporan keuangan | 0 | 3 |
| **Jumlah** | **6** | **7** |

Sumber : Data Primer diolah (2023)

Berdasarkan tabel diatas diperoleh jumlah keseluruhan jawaban “YA” sebanyak 6 jawaban dan jumlah keseluruhan jawaban “TIDAK” sebanyak 7 jawaban. Data tersebut digunakan sebagai dasar penghitungan persentase kriteria.

Perhitungan persentase kriteria dilakukan menggunakan rumus persentase Dean J. Champion sebagai berikut:

**Tabel 2. Perhitungan Persentase Kriteria dengan Rumus Dean J. Champion**

|  |
| --- |
| Perhitungan Persentase Kriteria dengan Rumus Dean J. Champion |
| $$Persentase= \frac{Jumlah jawaban "Ya"}{Jumlah seluruh jawaban }X 100\%$$ |
| $$Persentase= \frac{6}{13} X 100\%$$ |
| $$Persentase= 46,2\%$$ |

 Sumber : Data Primer diolah (2023)

 Dari tabel diatas diperoleh hasil persentase kriteria sebesar 46,2%. Hasil tersebut menunjukan bahwa dalam pelaporan keuangan percetakan PP belum sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). Hasil tersebut berdasarkan kriteria sesuai dengan tabel 3.2 kriteria nilai persentase. Pada tabel nilai kriteria sebesar 26%-50% dikategorikan belum sesuai.

# PEMBAHASAN

1. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut Andriani dkk (2022) selama krisis ekonomi Indonesia, UMKM merupakan sektor ekonomi yang paling tangguh. Kemampuan usaha kecil dan menengah perlu terus diperkuat dan dikembangkan, serta upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mengurangi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh usaha kecil dan menengah agar dapat memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Definisi UMKM yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 7 Tahun 2021 sebagai berikut:

a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah;

b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasi, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah;

c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan PP RI No 7 Tahun 2021 UMKM dikelompokan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Kriteria modal usaha UMKM sebagai berikut:

a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

c. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Kriteria hasil penjualan tahunan UMKM berdasarkan PP RI No 7 Tahun 2021 sebagai berikut:

a. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

b. Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);

c. Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang diperoleh dari data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah UMKM pada tahun 2019 mengalami perkembangan. Pada tahun 2018 jumlah UMKM sebanyak 64.194.057, sedangkan pada tahun 2019 jumlah UMKM sebanyak 65.465.497. Perkembangan UMKM pada tahun 2018-2019 sebanyak 1.271.440,5 atau sebesar 1,98%.

Menurut Farisi dkk (2022) faktor penghambat dan permasalahan dari Usaha Mikro terdiri dari 2 faktor: 1) Faktor Internal, merupakan masalah yang sering dihadapi oleh UMKM yaitu: a) Masih terbatasnya kemampuan sumber daya manusia. b) Terbatasnya area pemasaran produk yang sebagian besar dari pengusaha Industri Kecil lebih mengutamakan pada aspek produksi sedangkan untuk fungsi-fungsi pemasaran kurang mempunyai kemampuan dalam mengaksesnya, khususnya dalam memperoleh informasi pasar dari jaringan pasar, sebagai konsekuensinya sebagian besar dari mereka hanya sebagai tukang saja. c) Konsumen cenderung belum mempercayai kualitas produk industri kecil. d) Kendala yang sering dihadapi adalah masalah permodalan usaha dari sebagian besar industri kecil memanfaatkan modal sendiri yang jumlahnya relatif kecil. Faktor eksternal, merupakan masalah yang ditimbulkan oleh pihak pengembang dan pembina UMKM.

2. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM)

 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia pada tanggal 24 Oktober 2016. SAK EMKM dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas mikro, kecil, dan menengah. Entitas mikro, kecil, dan menengah adalah entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan, sebagaimana didefinisikan dalam Standar Akuntansi Keuangagn Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. ( IAI:2016).

Berdasarkan SAK ETAP yang dimaksud dengan entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang:

 a. Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan

b. Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal.

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) merupakan standar akuntansi keuangan yang berdiri sendiri dan dapat digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan (Nurazizah, Zulkarnain, 2022). SAK EMKM diharapkan mampu membantu pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan sehingga memudahkam pelaku UMKM mendapatkan akses pendanaan (Andriani, 2022).

Menurut Wardiya (2017:5) dalam Tasum (2020) Laporan keuangan adalah laporan tertulis yang merupakan bentuk pandangan secara wajar mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang ada. Dalam SAK ETAP tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu.

Sedangkan dalam SAK EMKM tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi posisi keuangan dan kinerja suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomik oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut.

Berdasarkan (IAI, 2016) dalam SAK EMKM laporan keuangan minimum terdiri dari laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan laba rugi selama periode, catatan atas laporan keuangan. Informasi posisi keuangan entitas terdiri dari informasi asset, liabilitas dan ekuitas pada tanggal tertentu, dan disajikan dalam laporan posisi keuangan. Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan yang dari mana manfaat ekonomik di masa depan diharapkan akan diperoleh oleh entitas. Liabilitas adalah kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomik. Ekuitas adalah hak residual atas asset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitasnya.

Informasi kinerja keuangan entitas terdiri dari informasi mengenai penghasilan dan beban selama periode pelaporan dan disajikan dalam laporan laba rugi. Penghasilan (*income*) adalah kenaikan manfaat ekonomik selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas masuk atau kenaikan asset, atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Beban (*expenses*) adalah penurunan manfaat ekonomik selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas keluar atau penurunan asset, atau kenaikan liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak disebabkan oleh distribusi kepada penanam modal.

**Tabel 3. Informasi Dalam Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM**

|  |  |
| --- | --- |
| Jenis Laporan Keuangan | Jenis pos yang dicakup |
| Laporan posisi keuangan | Kas dan setara kas |
| Piutang |
| Persediaan |
| Aset tetap |
| Utang usaha |
| Utang bank |
| Ekuitas |
| Laporan laba rugi | Pendapatan |
| Beban keuangan |
| Beban pajak |
| Catatan atas laporan keuangan | Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK EMKM |
| Ikhtisar kebijakan akuntansi |
| Informasi tambahan dan rincian pos tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan |

**Tabel 4. Analisis Perbandingan Penyusunan Laporan Posisi Keuangan Percetakan PP dengan SAK EMKM**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Pos Yang Dibandingkan**  | **Keterangan** |
| **YA** | **TIDAK** |
| 1 | Kas dan setara kas | Ѵ |  |
| 2 | Piutang | Ѵ |  |
| 3 | Persediaan |  | Ѵ |
| 4 | Aset tetap |  | Ѵ |
| 5 | Utang usaha | Ѵ |  |
| 6 | Utang bank |  | Ѵ |
| 7 | Ekuitas | Ѵ |  |
| **Jumlah** | **4** | **3** |

 Berdasarkan hasil dari analisis perbandingan yang telah dilakukan sesuai dengan tabel diatas diperoleh hasil sebanyak 4 jawaban “YA” yang menunjukan bahwa terdapat 4 pos yang sesuai dengan SAK EMKM. Diperoleh 3 jawaban “TIDAK” yang menunjukkan bahwa terdapat 3 pos yang tidak sesuai dengan SAK EMKM yang terdapat pada laporan posisi keuangan Percetakan PP.

**Tabel 5. Analisis Perbandingan Penyusunan Laporan Laba Rugi Percetakan PP dengan SAK EMKM**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Pos Yang Dibandingkan**  | **Keterangan** |
| **YA** | **TIDAK** |
| 1 | Pendapatan | Ѵ |  |
| 2 | Beban keuangan | Ѵ |  |
| 3 | Beban pajak |  | Ѵ |
| **Jumlah** | **2** | **1** |

 Diperoleh hasil sebanyak 2 jawaban “YA” yang menunjukkan bahwa terdapat 2 pos yang sesuai dengan SAK EMKM. Diperoleh 1 jawaban “TIDAK” yang menunjukkan bahwa terdapat 1 pos yang tidak sesuai dengan SAK EMKM yang terdapat pada laporan laba rugi Percetakan PP. Hasil tersebut diperoleh dari analisis perbandingan yang telah dilakukan sesuai dengan tabel diatas.

**Tabel 6. Analisis Perbandingan Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan percetakan PP dengan SAK EMKM**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Pos Yang Dibandingkan**  | **Keterangan** |
| **YA** | **TIDAK** |
| 1 | Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK EMKM |  | Ѵ |
| 2 | Ikhtisar kebijakan akuntansi |  | Ѵ |
| 3 | Informasi tambahan dan rincian pos tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan |  | Ѵ |
| **Jumlah** | **0** | **3** |

 Berdasarkan hasil dari analisis perbandingan yang telah dilakukan sesuai dengan tabel diatas diperoleh hasil sebanyak 0 jawaban “YA” yang menunjukan bahwa tidak ada pos yang sesuai dengan SAK EMKM. Diperoleh 3 jawaban “TIDAK” yang menunjukkan bahwa terdapat 3 pos yang tidak sesuai dengan SAK EMKM yang disebabkan karena Percetakan PP tidak menyusun catatan atas laporan keuangan.

# KESIMPULAN

 Berdasarkan hasil analisis, perbandingan, perhitungan, dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan pada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan percetakan PP didapatkan hasil persentase kriteria sebesar 46,2% yang menunjukkan hasil kriteria dikategori belum sesuai. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan pelaporan keuangan percetakan PP belum sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM).

#

# SARAN

Dalam penyusunan laporan keuangan sebaiknya percetakan PP menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM), sehingga laporan keuangan yang disusun lengkap dan memenuhi standar. Laporan keuangan yang disusun lengkap dan memenuhi standar akan memudahkan pengguna laporan keuangan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan.

 Percetakan PP sebaiknya menyusun laporan keuangan secara lengkap meliputi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan catatan atas laporan keuangan sesuai SAK EMKM supaya informasi yang disajikan lebih lengkap.

# DAFTAR PUSTAKA

Al Farisi, S., Iqbal Fasa, M., & Suharto. 2022. *Peran Umkm (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan*. Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah, *9*(1), 73-84. <https://doi.org/10.53429/jdes.v9iNo.1.307>

Andriani, Yayuk., Sucipto., Mohammad Orinaldi. 2022. *Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (Sak Emkm) Pada Usaha Mikro Kecil Menengah Kecamatan Nipah Panjang*. AT-TAWASSUTH:Jurnal Ekonomi Islam, 7.1:55-71.

Champion, Dean J. 1990. Metode dan Masalah Penelitian Sosial, Alih Bahasa :E.

Diana., Luqman Hakim., Muhammad Fahmi. *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Umkm Di Tangerang Selatan*. JURNAL MUHAMMADIYAH MANAJEMEN BISNIS, 3.2 (2022):67-74. DOI: https://doi.org /10.24853/ jmmb.3 .2.67-74

Effendi, S., Tukino, T., & Maulana, A. 2022. *Pembinaan Pengendalian Manajemen Keuangan Dengan Aplikasi ABSS Accounting Pada UKM Bank Sampah Mandiri*. Jurnal Pengabdian Barelang, *4*(1),48–54. [https://doi.org/10. 33884/jpb.v4i1 .4652](https://doi.org/10.%2033884/jpb.v4i1%20.4652).

Hakim, A. N. ., D. N. . Halawa, D. P. . Perdhana, N. I. . Novita, and O. . Telaumbanua. 2022. *Peran Struktur Organisasi Terhadap Produktivitas Perusahaan Pada CV. Kreasi Mandiri*. Jurnal Peradaban Masyarakat, vol. 2, no. 3, May, pp. 69-72, doi:10.55182/jpm.v2i2.162.

Indonesia, I. A., (2018). Standar Akuntansi Keuangan. (ONLINE), <http://iaiglobal.or.id/v03/files/file_sak/emkm/> .

Indonesia, Ikatan Akuntan. (2009).”Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Skuntabilitas Publik”.Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

Loviannauli P, Theresia., Saptono Nugroho. 2021. *Penelitian Komparatif Mengenai Pengelolaan Sampah Di Daya Tarik Wisata Pantai Candikusuma Jembarana Dan Pantai Kuta Badung*. *Jurnal Destinasi Pariwisata*. 9.2: 379-389.

Muti’ah, Firyal. 2021.*Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengahh (SAK EMKM) Pada UMKM Pengolahan Ikan Mba Noors*. Tugas Akhir. Tegal: Politeknik Harapan Bersama.

Ningrum, Oktavia., Titin Ruliana., Catur Kumala. 2022. *Analisis Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan Pada Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Berbasis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, Dan Menengah Pada Cv Anugrah Jaya*. Ekonomia 11.2: 017-026.

Nurazizah , N., & Zulkarnain , Z. . 2022. *Implementasi Standar Akuntansi Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM) Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Umkm Kota Sukabumi*. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan (JIAKu), 1(2), 176–187. <https://doi.org/10.24034/jiaku.v1i2.5398>

Sandingan Data UMKM 2018-2019 ([https://kemenkopukm.go.id/uploads/laporan/ 1650868533\_SANDINGAN\_DATA\_UMKM\_2018-2019%20=.pdf](https://kemenkopukm.go.id/uploads/laporan/%201650868533_SANDINGAN_DATA_UMKM_2018-2019%20%3D.pdf), diakses 20 Desember 2022)

Setyahuni, S. W., Oktoriza, L. A., & Purusa, N. A. 2022. PROKESMAS: Program Pelatihan Keuangan Sederhana Menuju UMKM Naik Kelas. Sasambo: Jurnal Abdimas (Journal of Community Service), 4(3), 408–416. <https://doi.org/10.36312/sasambo.v4i3.769>

Shinduprinata, Agietz. 2022. *Tinjauan Atas Penerapan SAK EMKM Pada UMKM Glass Of Dimension*.Jurnal Keuangan Negara dan Kebijakan Publik. 2.1 :8-15.

Siregar, Y. S. ., M. . Darwis, R. . Baroroh, dan W. . Andriyani. 2022. *Peningkatan Minat Belajar Peserta Didik Dengan Menggunakan Media Pembelajaran Yang Menarik Pada Masa Pandemi Covid 19 Di SD Swasta HKBP 1 Padang Sidempuan*. Jurnal Ilmiah Kampus Mengajar, vol. 2, no. 1, (Apr)., pp. 69-75, doi:10.56972/jikm.v2i1.33.

Siswanto, Rohani., Sodik., dan Rahayu Puji Suci. 2022. *Analisis komparatif tingkat kesehatan bank sebelum dan di masa pendemi covid–19 menggunakan metode RGEC*. Akuntabel. 19.3 (): 598-607. DOI: [https://doi.org/ 10.30872/jakt.v1 9i3.11758](https://doi.org/%2010.30872/jakt.v1%209i3.11758)

Tasum.2020. *Analisa Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Dan Menengah (SAK EMKM) Pada Laporan Keuangan Skaters Shop Distro*. Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Krisnadwipayana, 7(2), 82-99. <http://dx.doi.org/> 10.35137/jabk. v7i2.380

Wardani, Ayu Sri. 2021.*Analisis Penyajian Laporan Keuangan Berbasis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (EMKM) Pada Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Makassar*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.

Wibowo, Adhi Prasetyo Satriyo. 2022. *Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Paska Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*. Jurnal Budget 7.1: 76-95.

Wulandari, D., & Arza, F.I.2022. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi SAK EMKM pada UMKM Kota Padang*. Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA), 4 (3), 465-481.

Ramada, A. C., & Sandi, S. P. H. (2023). PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PADA UMKM PECI ANYAMAN BAMBU DI DESA KERTARAHARJA. *ABDIMA JURNAL PENGABDIAN MAHASISWA*, *2*(1), 3482-3488.

Yosefhin, G. (2022). ANALISIS PENGELOLAAN DAN PENCATATAN KAS KECIL PADA CV. HORPINTA SEJAHTERA KANDIS. <http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/8052>